

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Secara umum, akuntabilitas dikenal sebagai kewajiban individu atau organisasi internal dan eksternal, untuk mempertanggungjawabkan aktivitas mereka, dan mengkomunikasikan hasilnya secara transparan. Selain itu, tanggung jawab ini mencakup atas uang atau harta serta titipan lainnya sebagai pemberian layanan serta dampak kebijakan terhadap masyarakat (Alam *et al.*, 2019). Namun, akuntabilitas ini mengacu pada hubungan yang didasarkan pada komitmen dari beberapa orang untuk menunjukkan, meninjau dan mengambil tanggung jawab atas kinerja. Dari hasil yang telah disepakati dan dapat digunakan ini bukan hanya formal akan tetapi bisa mencakup hak serta kewajiban moral (McCall, 2012).

Akuntabilitas sebagai kepatuhan dan memenuhi tanggung jawab pribadi, perasaan berkewajiban kepada individu lain dan membenaran suatu tindakan kepada orang lain. Biasanya, ketika para pemimpin bertanggung jawab atas umpan baliknya, mereka akan merasa berkewajiban untuk menggunakan dan meningkatkan kinerjanya (Bella *et al.*, 2022). Akuntabilitas diyakini dapat memperbaiki kondisi pemerintahan untuk mengurangi tingkat korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencapai sistem pemerintahan yang demokratis (Bella *et al.*, 2022).

Di dalam akuntabilitas sektor publik, pemerintah harus bisa menjawab pertanyaan dari masyarakat tentang sumber dan pemanfaatan sumber daya publik yang telah dilaksanakan. Hal ini penting karena masyarakat mempunyai hak tertinggi untuk mengetahui dan menerima fakta ataupun data yang telah dilaksanakan oleh wakil-wakil yang mereka pilih (Bella *et al.*, 2022). Dari pengetahuan dua arah ini dapat mendukung pemerintah dalam mencapai tujuan atau sasaran serta kepentingan yang lebih besar ini,

akan menunjukkan akuntabilitas publik itu berjalan dengan baik atau tidak (Almquist *et, al.*, 2013). Dalam laporan yang telah dilaksanakan diharapkan pemerintah tidak akan memanipulasi layanan publik, demi keuntungan politik mereka masing-masing. Oleh karena itu, akuntabilitas dapat mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (Graycar *et, al.*, 2012).

**Tabel 1.1**  
**Penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung**  
**Tahun 2021-2022**

Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks RB Kota Bandar Lampung	60,05%	58,81% (CC)	97,93%	61,00%	58,77% (CC)	96,34%

*Sumber : LAKIP Tahun 2021-2022*

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) daerah kota bandar lampung pada tahun 2021-2022 telah dilaksanakannya evaluasi eksternal terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kota Bandar Lampung. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandar Lampung mendapatkan nilai (Indeks RB) yang di keluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dengan kategori adalah (CC) atau dengan nilai 58,81% dari Target pencapaian 60,05% di tahun 2021. Dan di tahun 2022 pemerintah daerah Kota Bandar Lampung masih mendapatkan nilai indeks (RB) yang sama yaitu dengan capaian nilai adalah 58,77% dengan target pencapaian sebesar 61,00%. Dikategorikan adalah (CC) atau Cukup (Memadai). Yang artinya nilai indeks RB akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kota bandar lampung tersebut di tahun 2021-2022 mengalami penurunan, atau belum dikatakan baik karena pada tahun 2020-2021 terjadi pandemi Covid 19 yang

mengakibatkan seluruh kegiatan banyak difokuskan ke WFH (Work From Home), atau lebih berfokus pada bidang kesehatan sehingga kinerja pemerintah kota bandar lampung sedikit mengalami hambatan dan menurunnya kualitas pelayanan. Dan di tahun 2022 program kerja pemerintah kota bandar lampung mulai kembali normal. Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah daerah itu dikatakan baik, jika nilai Indeks RB dengan kategori (A) ataupun (AA) yang artinya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah tersebut memuaskan atau sangat baik. Oleh karena itu akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kota bandar lampung perlu ditingkatkan kembali dalam perencanaan program dan sasaran yang ditetapkan agar akuntabilitas kinerja di tahun berikutnya meningkat.

Menurut Matsiliza & Zonke (2017) menyatakan bahwa integritas dapat dijadikan pilar terkait aturan hukum yang penerapannya dilaksanakan sesuai dengan tujuan organisasi, dan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja. Sehingga gambaran dari sistem integritas sendiri yaitu sebuah tindakan, tunduk dan patuh pada prinsip moral dan etika. Menurut Ardiani, (2019). mengatakan bahwa integritas berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja. Semakin tinggi integritas maka akuntabilitas kinerja akan semakin baik. Selain itu Pengendalian internal juga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dengan mekanisme kontrol yang kuat dari pemerintah daerah agar akuntabilitas kinerja lebih akuntabel (Jamil *et, al.*, 2021). Menurut Atiningsih (2019) menyatakan bahwa penegndalian inetenal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja. Semakin tinggi mekanisme kontrol yang ada di daerah maka sistem pengendalian internal di daerah tersebut akan baik terhadap akuntabilitas kinerjanya.

Selain pengendalian internal, kepemimpinan juga dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilihat dari seberapa baik kinerja pegawai dalam menjalankan tugas di pemerintahan, oleh karena itu kepemimpinan juga menjadi faktor dalam meingkatkan akuntabilitas

kinerja (Sintani, 2022). Menurut Dewi & Gayatri, (2019) menyatakan bahwa kepemimpinan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja. Semakin tinggi kinerja pegawai dalam menjalankan tugasnya maka akan semakin baik keimpinannya dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja di instansi pemerintah.

Dari fenomena tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di pemerintah daerah kota bandar lampung terkait akuntabilitas kinerja. Adapun Penelitian sebelumnya terkait penelitian tentang akuntabilitas kinerja. Menurut Ardiani, (2019) menyatakan bahwa integritas berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan rambutan, (Ahmad *et, al.*, 2020) bahwa Sistem Pengendalian Internal secara konsisten berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa. Menurut Pitaloka (2022) membuktikan bahwa sistem integritas berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas di sektor publik. (Prambudi *et, al.*, 2016) yang menyatakan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Bella *et, al.*, 2022), Peran Sistem Integritas, Sistem Pengendalian Internal, Kepemimpinan dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Ekowisata Mangrove. Perbedaan dalam Penelitian ini yaitu pada objek penelitian yang dimana dilakukan di pemerintah daerah kota bandar lampung yang sebelumnya dilakukan di Ekowisata Mangrove. Dengan judul “**Pengaruh Integritas, Pengendalian Internal dan Kepemimpinan Terhadap Akuntabilitas Kinerja (Studi Empiris di Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung)**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas maka dirumuskan beberapa masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah Integritas berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja ?
2. Apakah Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja ?
3. Apakah Kepemimpinan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja ?

## **1.3 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini dilakukan di Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung. Dengan menggunakan Variabel Independen yang diteliti yaitu Integritas, Pengendalian Internal dan Kepemimpinan. Sedangkan Variabel Dependen yang diteliti yaitu Akuntabilitas Kinerja.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijelaskan diatas maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk membuktikan secara empiris Pengaruh Integritas terhadap Akuntabilitas Kinerja di Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung.
2. Untuk membuktikan secara empiris Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Kinerja di Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung.
4. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Kepemimpinan terhadap Akuntabilitas Kinerja di Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan menjadi sumber refrensi bagi penelitian mengenai Integritas, Pengendalian Internal dan Kepemimpinan Terhadap Akuntabilitas Kinerja.

## 2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Masyarakat, temuan dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan terkait akuntabilitas di sektor publik sehingga terciptanya pemerintahan yang baik dan juga mengurangi praktik korupsi di pemerintahan.
- b) Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan perbaikan agar pemerintah daerah mengetahui faktor apa saja yang dapat mendukung terciptanya akuntabilitas kinerja sehingga dapat mengurangi praktik-praktik korupsi yang saat ini marak terjadi di pemerintahan daerah.

### 1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan dibagi menjadi (5) bab yang diuraikan sebagai berikut :

#### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi mengenai teori-teori yang mendukung penelitian ini, penelitian terdahulu, kerangka pikir dan hipotesis.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang definisi dan pengukuran variabel populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Bab ini tentang uraian deskripsi penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil penelitian.

#### **LAMPIRAN**

Bab ini berisi lampiran populasi dan sampel penelitian serta data penelitian dan hasil olahan data menggunakan Program SPSS Versi 23.